

# NASIONALISASI KOPERASI DI SULAWESI TAHUN 1950-AN: EKONOMI MENJADI (TIDAK) RASIONAL<sup>1</sup>

Oleh: Haliadi<sup>2</sup>

## *Abstract*

*This handing out study the process become the Indonesia --- nationalize--- (per)koperasi(an) in Celebes in 1950. Its problem is there any relation of between economics "benteng" with the economic institute system of people in the form of co-operation in Sulawesi in 1950?, how process nationalize co-operation as economic system of nationality at transitory time from NIT to totalitarian state of Indonesia in Sulawesi?, and Why Co-Operation in Sulawesi of non and at one blow become the rational economics? Pursuant to third this problem bunch, this handing out is aimed at by forwarding of pursuant to study postkolonialitas or dekonstruksi history by (meng)gambar(kan) is fact of how brittle "fact" co-operation in footstep the people mass in Sulawesi up to now. Breakdown of this handing out is convergent at First, understanding of early hitting to rehabilitate the economics of post independence applied in order to facing structural constraints from that moment economics (infrastruktur bottleneck). Economics nationalism which have axis to fortress program which announced by a April 1950 to push the national importer can vie with the foreign entrepreneur. Hereinafter introduced also credit system of inclusive of co-operation system and industrial and also commerce. But, brief during this policy see premature and ill considered for people mass. Second, Process the co-operation nationalization seen at governance NICA with forming on duty CBH namely at a period of NIT transform to become the Djawatan Koperasi dan Perniagaan Dalam Negeri (KPDN). Then, time of Totalitarian State of Republic of Indonesia formed, KPDN turn into three special post, namely: Jawatan Perdagangan, Jawatan Organisasi Usaha Rakyat, dan Jawatan Koperasi. Organizational amount growth of co-operation in Celebes Province of since 1949 a number of 118 fruit become 907 fruit in 1952. Third, phenomenon withdraw from the this people institute is seen by as brittle institute and even brittle very when in 2002 in Makassar (ex- provincial of Sulawesi in 1950) there are Koperasi Serba Usaha (KSP) -- Kospin, Koperasi Serba Usaha(KSU) Milik Bersama, KSU Merdeka, and KSU Maega Buana--- harming publics ( massa) in Pinrang, Makassar, Palu till Malaysia. They is got taken by promise is collapsible profit duplicate in week quantification. But, in reality of money which remit to become the lose at the same time with the loss of manager KSU. Any question, whether system monetisasi in co-operation not yet become the property of society Sulawesi? or whether happened again colonization (kolonialisasi) in the form of other, dissimilar with the money system of economic?, progress cause institute co-operation in 1950 most moving in the field of commodity commerce, like copra, cane, resin etcetera. Finally, economic history of nationality ---the core important co-operation institute--- in Sulawesi experience of the ruptur or turnaround.*

## **A. Ekonomi Menjadi (Tidak) Rasional: Sebuah Pengantar**

"Ini memang kenyataan, rakyat Sulawesi Selatan memang kaya, namun mudah dibodoh-bodohi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat selaku nasabah

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam: *Workshop on the Economic Dekolonisasi Side of Decolonisation* oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM pada tanggal 18-19 Agustus 2004 di Yogyakarta.

<sup>2</sup> Haliadi, S. S., M.Hum Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah.

Koperasi. Kondisi ini memang menjadi kenyataan mulai kasus kospin di Pinrang, KSU Merdeka dan beberapa kegiatan yang berkedok koperasi hingga tumbangnya KSU milik bersama yang dikomandoi pesilat koperasi HA Bustan MB. Selain itu pula hadir penipuan gaya baru berkedok yayasan Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Yamisa) yang konon menguasai dana Revolusi peninggalan Bung Karno.

Kamis kemarin Makassa kembali geger ketika ketua koperasi Serba Usaha Lembaga Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil-kerukunan Usaha Kecil dan menegah Indonesia (KSU-LKPPK-KUKMI) Achmad Yani SE, nyaris dibantai nasabahnya di jalan Diponegoro Makassar. Ketika itu Tenri salah seorang nasabah melihat Achmad dan langsung mengejanya. Namun ketua KSU itu berusaha menghindar. Akibatnya Tendri sambil mengejar berteriak pencuri dan dalam seketika Achmad berhasil dibekuk warga sekitar yang ternyata juga nasabah KSU pimpinan Achmad Yani SE. Beruntung petugas datang sehingga Achmad nyaris dihakimi massa.”<sup>3</sup>

Sungguh banyak hal yang bisa dibaca dalam wacana sebuah terbitan di Sulawesi Tengah ini. Yang pasti, lembaga ekonomi rakyat berupa koperasi ini telah mencapai suatu masa yang sesungguhnya sudah matang dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU). Tahun pembuatan berita ini adalah pada tahun 2002. Sesungguhnya, idealitas sebuah koperasi sudah harus terarah kepada lima dasar koperasi seperti yang dicita-citakan oleh Mohammad Hatta sesuai dengan dasar atau landasan koperasi sejak didirikan di Rochdale pada tahun 1844, yakni: koperasi dikemudikan oleh anggotanya sendiri yang disebut sebagai asas demokrasi *kooperatif*. Setiap anggotanya memiliki hak yang sama dengan tidak membedakan besarnya simpanan pokok maupun simpanan sukarela yang biasa disebut asas persamaan. Kemudian, keanggotaan koperasi terbuka kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, golongan atau aliran politik dalam artian azas keterbukaan. Selanjutnya, pembagian keuntungan didasarkan pada jasa mereka di dalam memajukan usaha koperasi dalam artian azas demokrasi ekonomi. Akhirnya, Koperasi menyisihkan bagian tertentu dari keuntungannya untuk kepentingan pendidikan baik bagi pengelola maupun anggotanya.<sup>4</sup> Keadaan seperti kejadian di Makassar tersebut, yakni empat puluh satu tahun yang lalu, tepatnya tahun 1951 di daerah Poso yakni salah satu wilayah Propinsi Sulawesi yang terpelosok waktu itu juga terlihat wacana koperasi sebagai berikut ini:

“Dalam rapat anggota, anggota2 mendesak supaya diperlihatkan bukti biar hanya 50 kg. Beras untuk didjual diwarung mereka sedangkan tjan papan merek telah ada.

Atas desakan ini Hasaning bertanjakan kepada para anggotanya : mana jang penting bukti diadakan , atau njawa dibela?

Mereka jang memasukan saham f. 500.-, 400.- dan f. 200.- tidak puas dengan keterangan tersebut mendesak terus dengan bertutjuran airmata supaya bukti mengadakan beras lantas diadakan, mengingat bahwa wang yang telah dimasukanja itu adalah total dari wang simpanan mereka modal berdjual beli untuk nafkahnja sehari-hari. Sambil menerangkan bahwa selama ini pendapatan mereka sangat merosot (kiris) selama wang mereka itu tidak ada lagi dalam tangan, dan hal ini pula telah menjadi perbantahan dalam rumah tangga mereka berhubung dengan tekanan hidup sehari2.”

---

<sup>3</sup> “Ketua KSU Nyaris Dibantai Nasabah,” *NUANSA POS*, Sabtu, 22 Juni 2002, hal. 1 dan 11.

<sup>4</sup> Mohammad Hatta, *Koperasi Sebagai Djembatan ke Demokrasi Ekonomi: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Balai Buku Indonesia), hal. 220-221.

Sekali lagi keadaan ini berlangsung pada tahun 1951, secara ekonomi bisa dibandingkan nilai mata uang waktu itu<sup>5</sup> dengan nilai uang pada tahun 2002. Maksudnya, tokoh **Hasaning** asal Makassar dalam mengumpulkan uang atas nama saham koperasi, kurang lebih sama dengan **Achmad Yani SE**, yang berbuntut penyelewengan uang rakyat atas nama mereka sendiri.

Pertanyaannya adalah mengapa rakyat tertipu di tahun 1951? Ya, barangkali karena waktu itu awal dari terbentuknya koperasi, artinya koperasi belum banyak diketahui baik ide maupun praktek. Namun, dalam keadaan yang sama di tahun 2000-an, rakyat Sulawesi kembali tertipu dengan model yang sama pula. Apakah masyarakat tidak mampu memahami gerakan, proses, dan termasuk sistem koperasi yang sesungguhnya sudah memasuki masa tua atau pelajaran ekonomi tidak berguna bagi masyarakat pada umumnya di Sulawesi? Makalah ini membahas proses menjadi Indonesia --nasionalisasi-- (per)koperasi(an) di Sulawesi pada tahun 1950-an. Studi ini memilih persoalannya berikut ini. Adakah hubungan antara ekonomi “benteng” dengan sistem lembaga ekonomi rakyat berupa koperasi di Sulawesi pada tahun 1950-an?, bagaimana proses nasionalisasi koperasi sebagai sistem ekonomi kerakyatan pada masa peralihan dari NIT (Negara Indonesia Timur) kepada negara kesatuan Indonesia di Sulawesi?, dan Mengapa Koperasi di Sulawesi bukan dan sekaligus menjadi ekonomi yang rasional? Berdasarkan ketiga gugus persoalan ini, makalah ini diarahkan pada pemaparan berdasarkan studi postkolonialitas (dekonstruksi sejarah) dengan (meng)gambar(kan) kenyataan betapa rapuh “kenyataan” koperasi dalam jejak langkah massa rakyat di Sulawesi hingga kini.

Kalau dipikir secara rasional, koperasi merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang telah matang umurnya. Seharusnya koperasi sudah menjadi lembaga ekonomi rakyat yang “objektif, teknis, dan sederhana.”<sup>6</sup> Realitas nyata dari dua episode jaman yang berbeda tersebut mengingatkan penulis kepada sebuah tulisan Peter Boomgaard yang berjudul “*Illicit Riches: Economic Development and Changing Attitudes Towards Money and Wealth as Reflected in Javanese Popular Belief.*” Soalnya di Sulawesi ada juga kepercayaan “*Pattirokanja*” semacam kepercayaan akan “*Tuyul*” di Jawa. Apakah memang masyarakat Sulawesi belum dapat menjadikan uang (monetisasi) sebagai alat untuk sistem ekonomi?

Pembahasan ini akan dibatasi pada kasus-kasus koperasi di Makassar dan tinjauan beberapa kasus koperasi di Sulawesi Tengah (Kasus di Poso dan Donggala) dan makalah ini juga dibagi dalam beberapa bagian, bagian pertama: prolog yang diberi judul Ekonomi Menjadi (Tidak) Rasional. Bagian kedua: program ekonomi benteng sebagai sistem nasionalisasi ekonomi. Bagian ketiga: nasionalisasi koperasi di Sulawesi. Bagian keempat atau yang terakhir epilog.

## **B. Program Ekonomi Benteng**

Program Benteng merupakan kebijakan pemerintah di tahun 1950-an dalam bidang ekonomi pada awal nasionalisasi. Program ini juga biasa disepadankan dengan ekonomi nasional atau nasionalisme ekonomi yang mencakup tiga dimensi utama, yakni: *Pertama*, suatu perekonomian

---

<sup>5</sup> Simbol rupiah waktu itu masih ditulis dengan symbol huruf f (*florijn*/ mata uang Perancis) sama dengan rupijah, lihat: S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda - Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 196.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, “Menjadi Negara Rasional,” dalam: Kuntowijoyo, *Esai-Esai Budaya dan Politik Selamat Tinggal Mitos dan Selamat Datang Realitas* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 206-210.

yang diversifikasi dan stabil dengan dihilangkannya ketergantungan yang besar pada ekspor bahan mentah; *Kedua*, Pengembangan perekonomian dalam rangka mencapai kemakmuran melalui pembangunan ekonomi; *Ketiga*, pengalihan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang Barat (Eropa) dan Cina (Asing) ke tangan orang-orang Indonesia. Hal itu berarti bahwa pengawasan finansial dianggap penting sebagai realisasi konkrit dari intervensi negara dalam perekonomian. Implementasi nasionalisasi ekonomi dalam program benteng yang dicanangkan dan diumumkan pada bulan April 1950 diperlihatkan oleh intensitas intervensi negara atas lembaga-lembaga ekonomi dan perundang-undangan yang diterapkan di tahun 1950-an. Implementasi pokok dari program benteng yang kelihatan adalah mendorong para importir nasional agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing termasuk Cina.

Ekonomi Benteng berlangsung sejak tahun 1950 hingga Kabinet karya Djuanda (nonpartai). Pada masa kabinet Natsir (Masyumi) program benteng diarahkan pada dua hal, yakni: program-program industri (rencana urgensi) dan penghapusan hak-hak histories. Kemudian, politik benteng dikendorkan pada masa kabinet Sukiman (Masyumi dan PNI). Selanjutnya, politik benteng diperketat kembali pada masa kekuasaan kabinet Wilopo (1952-1953). Politik benteng diarahkan pada kebijaksanaan Iskaq yang terarah pada pro pribumi dan kebijakan Rooseno yang lebih menyeleksi lagi pada tahun 1954. Akhirnya, pada masa Burhanuddin Harahap program benteng diarahkan pada: 1. semua usaha (termasuk peranakan) disebut usaha nasional. 2. Seleksi semakin ketat bagi prioritas tidak berubah banyak. Program ini berakhir pada masa Kabinet Djuanda.<sup>7</sup>

Sepanjang diberlakukannya apa yang disebut sebagai ekonomi benteng sebagai program ekonomi nasional dan awal nasionalisasi pasca kolonial Belanda. Perekonomian di Sulawesi terdapat dua fase perkembangan yakni: Pertama, fase NICA menduduki kota-kota besar di Sulawesi dengan membentuk jaringan perdagangan resmi NIGIEO, AIO, dan SIPET. Demi menyehatkan system perekonomian di Sulawesi terutama di Makassar, maka Nadjamuddin Dg Malewa selaku perdana Menteri dan Menteri Perekonomian NIT menyerankan membentuk maskapai dagang atau NV. Akhirnya didirikan Maskapai perdagangan NV. Indonesia Trading C.O., NV. Handel Mij. Indonesia Timur, dan NV. Handel Mij. Madjoe. Sementara, dalam perkapalan KPM masih melakukan operasi, namun beberapa pelayaran di Sulawesi mulai diaktifkan dalam bentuk usaha perkapalan. Usaha perkapalan dan perdagangan itu antara lain: NV. Nocemo di Manado, NV. Maskapei Kapal Sulawesi Selatan (MKSS) di Makassar, NV. Lokumij di Gorontalo, NV. Perkapalan Nasional (Perni) di Gorontalo, NV. Perkapalan dan Pelajaran Indonesia Gorontalo (Perdigo) di Gorontalo.<sup>8</sup>

Salah satu gambaran mekanisme perdagangan di Sulawesi adalah keadaan perdagangan di pelabuhan Donggala Sulawesi Tengah. Keadaan perdagangan di daerah Donggala pada tahun 1952 masih menampilkan suatu perekonomian yang masih memakai sistem ekonomi tradisional atau perekonomian yang tidak tersentuh oleh program ekonomi nasional. Keadaan ekonomi Donggala dinyatakan bahwa:

“1. pengaruh bangsa Asing didalam soal ekonomi, terutama didalam soal perdagangan di dalam daerah ini, masih sangat mendalam, karena masih hampir 90% berada di dalam

---

<sup>7</sup> Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Perspektif* (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 71-72.

<sup>8</sup> *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953), hal. 298.

tangan mereka. 2. Pentjurian barang2 dagangan dan bahan2 makanan di kapal2 K.P.M. oleh pengerdja2 kapal ternyata masih berjalan terus, buktinja pengerdja2 di kapal K.P.M. jang berlabuh di pelabuhan Donggala, masih banjak mendjual barang2 seperti rokok dan bahan makanan seperti gula pasir, beras, kopi dsb. Kepada penambang2 di Donggala. Barang2 mana dengan djalan menjelundup meliwati Douane dimasukan ke kota Donggala.”<sup>9</sup>

### C. Nasionalisasi Koperasi di Sulawesi

Sebelum perang dunia ke-2 wilayah Propinsi Sulawesi belum ada kantor yang mengurus koperasi secara khusus, namun indikasi tentang gerakan Koperasi sudah ada di Minahasa sebagai perkumpulan koperasi kredit yang pengawasannya ditangani langsung oleh A.V.B di Manado. Sesudah NICA mendarat di wilayah Sulawesi dan melakukan /membangun pemerintahan dibentuklah Dinas CBH yang dimasa NIT menjelma menjadi Djawatan Koperasi dan Perniagaan Dalam Negeri (KPDN). Walaupun dalam KPDN telah bada ada perkataan “koperasi” namun yang dipentingkan dalam jawatan ini adalah masalah perdagangan. Pada akhir tahun 1949 terdapat 118 buah koperasi menjadi 907 buah pada tahun 1952 dan 19 diantaranya sudah berbadan hukum dan selebihnya sedang dalam pengurusan dan penyelidikan badan hukum.

Pada waktu negara kesatuan terbentuk, tugas jawatan KPDN dibagi menjadi tiga jawatan khusus, yakni: Djawatan Perdagangan, Djawatan Organisasi Usaha Rakyat, dan Djawatan Koperasi. Jawatan Koperasi waktu itu kurang mendapat perhatian yang berarti di Sulawesi. Pegawainya hanya empat orang lalu kemudian tinggal dua orang karena dua lainnya memilih bekerja di tempat lain. Pada tahun 1951, pegawai koperasi secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 50 orang dan kebanyakan dari tenaga administrasi. Kantor koperasi sudah terformasi dalam delapan kota di Sulawesi. Pada tahun 1952 baru dibuka kantor-kantor koperasi di semua kabupaten terutama di kota Palu dan Poso daerah Sulawesi Tengah, Bau-Bau di wilayah Sulawesi Tenggara dan Watampone Bone Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1952 jumlah koperasi di sulawesi mengalami peningkatan yang begitu signifikan yakni dari 118 menjadi 907. Keadaan seperti itu tersebar di beberapa kota, terutama:

NO	KOTA	JUMLAH KOPERASI
1	Makassar	37
2	Bantaeng	10
3	Bone	16
4	Pare-Pare	45
5	Mandar	22
6	Luwu	29
7	Sulawesi Tenggara	1
8	Poso	8
9	Donggala	53
10	Sulawesi Utara	271
11	Minahasa	277

<sup>9</sup> Laporan Politik Bulan Oktober 1952, dalam: Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi, nomor registrasi: 236

12	Sangir Talaud	138
	Jumlah	907

Sumber: *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hal. 393.

Corak koperasi yang berjumlah 907 itu terdiri atas: koperasi pusat 11 buah, koperasi desa sebanyak 61, koperasi kredit sebanyak 84, koperasi lumbung 1, koperasi produksi 313 buah, koperasi konsumsi 421, dan koperasi yang bercorak lain 14 buah. Dalam buku yang diterbitkan oleh jawatan penerangan disebutkan bahwa: "Sebagai objek dari politik kemakmuran yang aktif, Pemerintah memberi dorongan dalam hal mamajukan koperasi selaku satu-satunya organisasi yang jitu untuk mempertinggi tarap-penghidupan dan tingkat kemakmuran masyarakat."<sup>10</sup>

Pada tahun 1952 koperasi di Sulawesi Selatan sudah ada,<sup>11</sup> namun sampai tahun 1954, koperasi di Sulawesi Selatan belum menunjukkan perkembangan yang berarti.<sup>12</sup> Tahun 1955 gerakan koperasi mulai ada sedikit kemajuan, dengan berdirinya koperasi pegawai, yang terbentuk akibat adanya bantuan moril dan materil dari pemerintah.<sup>13</sup> Tahun 1956, manfaat koperasi mulai sedikit dirasakan khususnya di kalangan pegawai. Pegawai mulai belanja di koperasi dan mengurangi sistem bon ditoko-toko Tionghoa yang harganya tentu lebih mahal.<sup>14</sup> Tahun 1961 jumlah koperasi di Sulawesi Selatan telah mencapai angka 911 buah,<sup>15</sup> Kemungkinan lain yaitu keluarnya PP. No. 140/ 1961 tentang penyaluran bahan- bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, minyak tanah, minyak kelapa, ikan asin, garam tekstil, batik, dimana koperasi diberi wewenang untuk penyalurannya.<sup>16</sup> Kemungkinan lainnya adalah adanya bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah dan Kodam Hasanuddin kepada koperasi- koperasi di daerah yang disalurkan melalui Kepala- kepala daerah setempat sejak tahun 1960. Besarnya bantuan kredit tersebut senilai Rp. 5. 400. 000,- .<sup>17</sup> Angka yang sangat besar untuk ukuran waktu itu. Bahkan Pemerintah Sulawesi Selatan pernah merencanakan membubarkan semua toko sandang pangan dan sebagai penyalur resmi kebutuhan sehari-hari ditunjuk koperasi- koperasi RK/ RT.<sup>18</sup> Begitu besar perhatian pemerintah Orde Lama pada koperasi di Sulawesi Selatan.

Hal menarik lainnya yang penting dicermati tahun 1966-1969 koperasi di Sulawesi Selatan berada pada tahap rehabilitasi dan konsolidasi,<sup>19</sup> Menjawab pertanyaan ini mungkin dapat dimulai dari bentuk kebijakan pemerintah orde lama yang berlandaskan ekonomi terpimpin. Hal ini tercermin dari tujuan pemerintah Sulawesi Selatan membangun koperasi yaitu: "koperasi

<sup>10</sup> *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi, Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Laporan Bulanan Untuk Nopember 1952 Bahagian Politik Kota Besar Makassar.

<sup>12</sup> Laporan Bulanan Daerah Kota Besar Makassar ( Bahagian Politik ) untuk Bulan Januari 1954.

<sup>13</sup> Laporan Bulanan Bahagian Politik Daerah Kota Makassar untuk Bulan September 1955.

<sup>14</sup> Laporan Bulanan Bahagian Politik Daerah Kota Makassar untuk Januari 1956.

<sup>15</sup> Laporan Tahunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tahun Kerja 1961, hal. 84.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 230.

<sup>19</sup> Toddopuli. Memori H. Achmad Lamo, Gubernur Kdh Tk. I Sulawesi Selatan 1966-1978 (Ujung Pandang: Pemda Prop. Sulsel, 1978), hal. 11.

harus merupakan jaminan kearah perwujudan kemakmuran dan kesedjahteraan yang merata, lepas dari tekanan2 serta pengaruh2 pihak2/golongan2 bermodal”<sup>20</sup> Demi memperbesar usaha koperasi di Sulawesi Selatan, Pemerintah Sulawesi Selatan masa Orde Lama pernah merencanakan untuk membubarkan semua toko sandang pangan dan sebagai penyalur resmi kebutuhan sehari- hari ditunjuk koperasi- koperasi RK/ RT.<sup>21</sup>

Masyarakat Sulawesi Selatan begitu terpesona oleh munculnya sebuah permainan sulap uang yang tidak tertandingi dari Sulawesi Selatan yang terletak di Pinrang yang gaungnya menyebar hingga ke negeri tetangga, Malaysia yang berbaju koperasi yang dikenal dengan Kospin yang membuat orang bermimpi jadi orang kaya. Uang mengalir bagaikan aliran ke daerah tersebut. Masyarakat betul- betul terbius oleh pabrik uang tersebut. Namun dalam waktu beberapa lama Kospin itu menyisakan sejuta masalah, bahkan menimbulkan kerusuhan massal sampai menghancurkan Kota Pinrang. Masih terbayang sisa kehancuran di kota tersebut, di berbagai tempat di Makassar, muncul lagi pabrik- pabrik uang lainnya yang juga menggunakan label koperasi yang dikenal dengan nama KSU seperti KSU Milik Bersama, KSU Merdeka, KSU Maega Buana dan lain- lain Masyarakat kembali terbius dan bermimpi menjadi kaya.. Kospin, KSU semuanya menggunakan koperasi sebagai label. Masyarakat Betul- betul terbius dengan namanya koperasi. Orde Baru tepatnya Pelita I Jumlah Koperasi sudah mencapai 1.213 buah.<sup>22</sup> Sebuah angka yang cukup fantastis.

Pada tahun 1950 di Palu ibukota Sulawesi Tengah terah diperkenalkan koperasi rakyat oleh Letnan Solang. Dalam catatan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Donggala, dikatakan bahwa:

“Diduga bahwa pada bulan dimuka modal ini akan bertambah besar. Maksud koperasi rakyat ini supaya rakyat sendiri dengan keninsafan akan mendjalankan koperasi ini, tetapi pada pendapat saja sebaik2nya djika koperasi ini dapat dipimpin oleh seorang yang achli dalam urusan koperasi, walaupun didatangkan dari mana sadja (selaku *bedrijfsleider*), pemimpin mana akan bekerdja dibawa pengawasan Pemerintah.”<sup>1</sup>

Jumlah uang yang dimaksudkan oleh KPN Donggala tersebut adalah uang yang dikumpulkan dari tiga distrik dibawah Onder Afdeling Donggala, yakni: Distrik Tawaeli Selatan sebesar f 72.000, Distrik Banawa Tengah sebesar f 35.000, dan Distrik Sirenja sebesar f 30.000. Sedangkan untuk wilayah Palu dan sekitarnya, uang yang terkumpul untuk modal koperasi sebagai berikut ini:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 230.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>1</sup> Laporan Politik Daerah Sulawesi Tengah Bulan September 1950, dalam: Arsip Propinsi Sulawesi, nomor registrasi: 222.

NO	DAERAH	GULDEN	KET.
1.	Palu	10.000	
2.	Talise	3.000	
3.	Tatura	11.000	
4.	Dolo	20.000	
5.	Petobo	2.000	
6.	Sibalaya	20.000	
7.	Kulawi	30.000	
8.	Biomaru	6.000	

Sumber: Laporan Politik Daerah Sulawesi Tengah Bulan September 1950, dalam: Arsip Propinsi Sulawesi, nomor registrasi: 222

Tokoh Koperasi Luwuk yang bernama Larioh melakukan perjalanan dinas untuk menyelidiki keadaan dan perkembangan koperasi dengan Lumenta Kepala Djawatan koperasi Kabupaten Poso. Mereka melakukan perjalanan selakma sebulan di Bulan Pebruari 1952. Menurut kesimpulannya bahwamasyarakat menganggap pemerinbtah tidak memperhatikan persoalan-persoalan yang muncul dalam koperasi. Diapun memberika argumentasi terhadap persoalan ini bahwa: "1. Djawatan koperasi harus memberi didikan pada kader2 koperasi, untuk mempertinggi keinsjafan berkoperasi dan memegang buku. 2. Perlu diterangkan arti koperasi jang sebenarnya, bukanlah koperasi yang sebenarnya (kongsi, toko) kearah koperasi sempurnah menurut djiwa koperasi tulen. 3. Bahwa pemerintah tidak memperhatikan itu dapatlah saya sangkal , oleh karena pemerintah tidak boleh turut campur urusan dari koperasi, sebab tiap-tiap koperasi adalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangganya sendiri. Pemerintah hanya dapat meberi petunjuk-petunjuk, anjuran-anjuran, dan nasihat-nasihat jika diminta oleh pengurus dan anggota koperasi. Tetapi pemerintah akan bertindak, jika pengurus atau anggota secara resmi menunjukkan keberatan terhadap anggota lainnya yang membuat kesalahan kriminal. Djika tidak ada dakwaan sedemikian, maka pemerintah tidak dapat berbuat sesuatu apa. Maklumlah kebanyakan anggota-anggota hanya mengomel di luar saja, tetapi tidak berani mengambil tindakan tegas untuk mendakwah pada pemerintah. Dan sikap inilah yang harus dibuang sejauh-jauhnya oleh rakyat. 4. Dari pihak kantor koperasi harus aktif memberi pimpinan, pendidikan, penerangan serta pengawasan pada semua-semua took-toko koperasi yang ada, agar supaya semua koperasi dapat maju berkembang. Untuk mentjapai ini, harus bekerdja sama dengan pemerintah2 setempat."<sup>23</sup>

Ada banyak kasus menarik sehubungan dengan pendirian koperasi di daerah-daerah yang paling bawah di Propinsi Sulawesi. Pada bulan Oktober 1951 di wilayah Poso seorang lelaki yang bernama Hasaning yang berasal dari Makassar berhasil meyakinkan Wakil Raja Una-Una B. Borahima dan Juru tulisnya yang bernama S.Majah. Dia telah mendirikan BPKI (Badan Perjuangan Irian). Setelah membentuk cabang BPKI di Una-Una mereka melanjutkan perjalanan ke ibukota Kabupaten Poso, tepatnya di Kayamanya bahwa pada bulan November 1951 terbentuklah BPKI beserta dengan koperasinya yang diketuai oleh Lakareseng dan penulisnya Mohdar Seheber dan anggotanya kurang lebih berpuluh-puluh orang. Uang yang terkumpul

---

<sup>23</sup> Laporan Perjalanan Dinas ke wilayah Luwuk, dalam Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi, nomor registrasi 236.

waktu itu sebagai saham awalnya kurang lebih Rp 400.<sup>24</sup> Anggota-anggota koperasi BPKI adalah sebagai berikut ini:

---

<sup>24</sup> Laporan yang dibuat oleh Wedana J.K.Janis tanggal 20 Juni 1952.

NO	NAMA	SUKU	ALAMAT	SAHAM
1.	Lakaraseng	Bugis	Kayamanya	Rp. 700
2.	Sahiber	Banjar	Kayamanya	Rp. 500
3.	Latibe	Bugis	Kayamanya	Rp. 500
4.	Manahsu	Bugis	Kayamanya	Rp. 200
5.	Lasongke	Bugis	Kayamanya	Rp. 200
6.	Mapesangka	Bugis	Napu	Rp. 200
7.	Gani	Kaili	Kayamanya	Rp. 10

Keadaan seperti itu tidak dipantau oleh pemerintah terutama Djawatan Koperasi karena sepanjang tahun 1952, dia berada di tempat atau wilayah kerja karena hanya selama enam bulan berada di tempat selebihnya dia ke Makassar dan ke Jakarta. Hal itu juga dapat dilansir dalam sumber yang menyatakan bahwa “dengan djalan demikian, maka perkundjungannya dalam wilayahnya hampir-hampir tidak bisa diadakan, sehingga koperasi di tempat2 djauh tidak pernah menerima pimpinannya.”<sup>25</sup> Beredasarkan hal itu, maka pemerintah terkait belum ada inisiatif yang baik untuk menyehatkan sistem ekonomi yang baik.

#### D. Epilog

Mengikuti gagasan dari Kuntowijoyo mengenai “Negara Rasional,” maka dalam makalah ini disimpulkan *pertama*, ekonomi yang rasional dalam lembaga koperasi harus objektif berhubungan dengan masyarakat yang menyadari akan adanya proses ekonomi dalam sistem koperasi. Pada awal nasionalisasi di tahun 1950-an, massa rakyat kecil masih dapat ditolerir kalau tidak memahami system maupun idee dari lembaga koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Hal itu dapat dimengerti karena masih dalam taraf sosialisasi dan pengenalan. Tugas pemerintahlah yang memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sehubungan dengan system administrasi hingga proses berkoperasi yang baik. Namun, akan menjadi aneh kalau kejadian di tahun 1950-an masih juga terjadi di tahun 2000-an.

*Kedua*, koperasi teknis merupakan koperasi yang hanya mengurus masalah-masalah mendasar dari sistem koperasi yang sesungguhnya. Tidak salah dan bahkan akan lebih baik kalau mengikuti lima dasar koperasi menurut gagasan Mohammad Hatta. Hatta menyampaikan lima azas koperasi yang harus diperjuangkan yakni kooperatif, persamaan, keterbukaan, demokrasi ekonomi, dan pendidikan akan mengarahkan kita pada suatu system ekonomi rakyat yang sehat.

*Ketiga*, koperasi dengan segala bentuk kesederhanaan adalah koperasi yang menggunakan uang sebagai alat dan kedaulatan rakyat diatas segala-galanya. Kepercayaan “*pattirokanja*” yang mementingkan “harapan” ketimbang kerja keras sudah saatnya dirombak dengan suatu sistem ekonomi yang rasional. Kepercayaan *pattirokanja* adalah semacam kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan mengenai orang yang memelihara mahluk gaib yang selalu mencuri uang untuk kekayaan pemiliknya. Fenomena Koperasi Serba Usaha (KSU) yang menggegerkan masyarakat Sulawesi hingga Malaysia Timur dan menyentuh semua segmen masyarakat di tahun 2000-an adalah pengaruh kepercayaan akan kemewahan dengan tidak bekerja keras.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

## Daftar Pustaka

- "Ketua KSU Nyaris Dibantai Nasabah," *NUANSA POS*, Sabtu, 22 Juni 2002
- Kuntowijoyo, "Menjadi Negara Rasional," dalam: Kuntowijoyo, *Esai-Esai Budaya dan Politik Selamat Tinggal Mitos dan Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan, 2002.
- Laporan Politik Bulan Oktober 1952, dalam: Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi, nomor registrasi: 236
- Laporan Bulanan Untuk Nopember 1952 Bahagian Politik Kota Besar Makassar.
- Laporan Bulanan Daerah Kota Besar Makassar ( Bahagian Politik ) untuk Bulan Januari 1954.
- Laporan Bulanan Bahagian Politik Daerah Kota Makassar untuk Bulan September 1955.
- Laporan Bulanan Bahagian Politik Daerah Kota Makassar untuk Januari 1956.
- Laporan Tahunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tahun Kerja 1961
- Laporan Politik Daerah Sulawesi Tengah Bulan September 1950, dalam: Arsip Propinsi Sulawesi, nomor registrasi: 222.
- Laporan Perjalanan Dinas ke Wilayah Luwuk, dalam Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi, nomor registrasi 236.
- Laporan Perjalanan yang dibuat oleh Wedana J. K. Janis tanggal 20 Juni 1952.
- Mohammad Hatta, *Koperasi Sebagai Djembatan ke Demokrasi Ekonomi: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi*, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda - Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Perspektif*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Toddopuli. Memori H. Achmad Lamo, Gubernur Kdh Tk. I Sulawesi Selatan 1966- 1978 (Ujung Pandang: Pemda Prop. Sulsel, 1978.